

SKRIPSI

**KERJASAMA TRANSNASIONAL ANTARA ACTIONAID DAN
YAYASAN SIKOLA MOMBINE UNTUK PENANGANAN
KORBAN BENCANA TSUNAMI DI PALU**

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMATIA

E061171312



PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA TRANSNASIONAL ANTARA ACTIONAID DAN
YAYASAN SIKOLA MOMBINE UNTUK PENANGANAN
KORBAN BENCANA TSUNAMI DI PALU

N A M A : RAHMATIA

N I M : E061171312

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 1 Maret 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Bama Andika Putra, S.IP, MIR
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA TRANSNASIONAL ANTARA ACTIONAID DAN
YAYASAN SIKOLA MOMBINE UNTUK PENANGANAN
KORBAN BENCANA TSUNAMI DI PALU

N A M A : RAHMATIA

N I M : E061171312

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 26 Februari 2021.

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si.

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatia

Nomor Induk : E061171312

Program Studi : Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Kerjasama Transnasional antara ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine untuk Penangana Korban Bencana Tsunami di Palu

Adalah karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



ABSTRAK

Rahmatia, E061171312, “Kerjasama Transnasional antara ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine untuk Penanganan Korban Bencana Tsunami di Palu” dibawah bimbingan H. Darwis, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Bama Andika Putra, S.IP., M.IR selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk kerjasama transnasional yang terjalin antara ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine dalam penanganan korban bencana tsunami di Palu serta dampak dan pengaruh dari kerjasama tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan dengan teknik analisis data kualitatif. Pemilihan metode penelitian tersebut bertujuan untuk membantu penulis dalam memperoleh data dan menganalisisnya sehingga dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Data-data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan topik dan pokok permasalahan penelitian yang penulis dapatkan dari buku-buku, dokumen, jurnal, artikel, dan berita yang diakses melalui internet. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, bentuk kerjasama transnasional yang terjalin antara ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine merupakan bentuk kerjasama kemitraan. Kemitraan yang terjalin tersebut dihubungkan oleh aktor lain, yaitu YAPPIKA yang merupakan anggota federasi ActionAid dan sebagai organisasi non pemerintah yang berbasis di Indonesia. Kemitraan tersebut dijalin untuk menangani berbagai permasalahan, khususnya isu kemanusiaan, yang timbul akibat dari bencana alam yang terjadi di Kota Palu dan beberapa wilayah terdampak lainnya. Hubungan kemitraan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi para korban terdampak. Salah satunya yaitu penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran, yaitu kepada korban-korban yang sangat membutuhkan uluran bantuan. Selain itu, dengan adanya keterlibatan NGO dalam penanganan bencana ini, pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan lain yang sulit atau belum menjadi perhatian pemerintah.

Kata Kunci: ActionAid, Yayasan Sikola Mombine, Kerjasama Transnasional, Penanganan Bencana Alam, Kota Palu, NGO, *Track II Diplomacy*.

ABSTRACT

Rahmatia, E061171312, “Transnational Cooperation between ActionAid and Yayasan Sikola Mombine for Handling Tsunami Victims in Palu” under the guidance of H. Darwis, MA., Ph.D as supervisor I and Bama Andika Putra, S.IP., M.IR as supervisor II, in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This research was prepared with the aim of knowing and understanding the form of transnational cooperation that exists between ActionAid and Yayasan Sikola Mombine in handling tsunami victims in Palu and the impacts & effects of this collaboration. The research method used by the author in compiling this thesis is qualitative research and qualitative data analysis techniques. The choice of research method aims to assist the author in obtaining data and analyzing it so that it can answer the problem formulation of this study. The data obtained by the author comes from literature relevant to the topic and subject matter of the research that the author gets from books, documents, journals, articles, and news accessed via the internet. Based on the research that the author has done, the form of transnational collaboration that exists between ActionAid and Yayasan Sikola Mombine is a form of partnership collaboration. This partnership is linked by other actors, namely YAPPIKA which is a member of the ActionAid federation and as a non-governmental organization based in Indonesia. The partnership was established to deal with various problems, especially humanitarian issues, which arose as a result of the natural disasters that occurred in Palu City and several other affected areas. This partnership relationship has had a huge impact on the affected victims. One of them is that disaster management can be carried out more quickly and on target, namely to victims who desperately need help. In addition, with the involvement of NGOs in disaster management, the government and other government agencies feel very helpful in resolving other problems that are difficult or have not yet become the government's attention.

Keywords: ActionAid, Yayasan Sikola Mombine, Transnational Cooperation, Natural Disaster Management, Palu, NGO, Track II Diplomacy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir penulis yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kerjasama Transnasional antara ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine untuk Penangana Korban Bencana Tsunami di Palu”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang ingin belajar dan memahami lebih jauh terkait kerjasama transnasional antar *non state actor* serta peran dalam penanganan bencana alam.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tentunya menemui banyak hambatan dan tantangan yang tentunya tidak dapat penulis hadapi sendiri. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya orang-orang yang selalu berada di samping penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti, **Papa** dan **Mama**, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan yang terbaik tanpa meminta balasan sedikit pun. Tiada kata maupun tindakan yang dapat membalas semua jasa, kasih sayang serta dukungan yang tanpa henti kalian berikan kepada penulis hingga saat ini. Penulis sangat bersyukur bisa terlahir sebagai anak kalian. Semoga Allah selalu melindungi kalian, aamiin.

2. Kepada **Fiani**, penulis selalu bersyukur bisa memiliki kakak yang selalu ada dan mau menjadi tempat cerita yang tentunya selalu diiringi dengan nasehat ataupun hanya sekedar candaan, hal kecil tapi sangat berarti bagi penulis. **Sidik**, adik terganteng dan tersayang, maafkan penulis masih memiliki banyak kekurangan sebagai kakak, tapi kehadiranmu sebagai seorang adik memberikan semangat yang besar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan baik. Semangat masuk perguruan tinggi tahun ini. **Mano**, adik kecil yang selalu bisa bikin *mood* jungkir balik. Kehadiranmu sangat berarti terutama saat penulis sedang tidak semangat mengerjakan skripsi, kamu tiba-tiba datang dengan cerita lucu tapi dengan ekspresi datar. *love you!!*
3. Kepada keluarga besar, **Nenek, Kakek, Om, Tante**, dan Sepupu-sepupu terkhusus **Nanda** dan **Putri**, terimakasih yah kalian selalu mau jadi tempat curhat, tempat mengeluh, orang yang selalu memberikan semangat, tanpa kalian penulis akan sedikit kesepian di Palu hehe. Terimakasih yah.
4. Terkhusus kepada dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional yang sterus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah. **Kak Gego**, terimakasih untuk ajakan seminar, traktiran pizza (sampai dapat julukan tizza), dan banyak lagi *event-event* yang sangat bermanfaat bagi penulis, *i miss you* kak, sehat dan sukses selalu di Belanda. **Kak Aswin**, penulis sangat sangat berterimakasih atas ilmu menelitinya. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi yang baik tidak lepas dari ilmu yang kak berikan selama ini, baik dari PKM

sampai dari kolaborasi penelitian. Terimakasih juga untuk traktiran pizza nya hehe. **Pak Nasir**, alhamdulillah jadi bisa menghitung pakai bahasa Thailand. Berkat bapak, penulis bisa kenal banyak teman-teman dari Thailand dan juga dari mahasiswa-mahasiswa Unsulbar, penulis mendapatkan kesempatan menjalin pertemanan yang lebih luas, terimakasih banyak pak. **Kak Bama**, bersyukur sekali bisa dapat kita sebagai dosen PA dan alhamdulillah berlanjut jadi dosen pembimbing. Terimakasih sekali kak karena selalu membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Yang terhormat dan tentunya yang penulis sayangi, **Pak Darwis**, terimakasih banyak pak atas masukan-masukan skripsinya, penulis tidak dapat sempurna tanpa coretan tangan dari bapak. Mohon maaf juga atas teror WA dan telpon tanpa hentinya pak. **Pak Bur, Pak Munjin, Kak Jannah, Bu Puspa, Pak Patrice, Pak Aspi, Pak Adi, Pak Agus, Pak Ishaq, Kak Aca, Bu Seni**, dan kepada seluruh dosen HI, penulis ucapkan banyak terimakasih atas ilmunya.

5. Kepada **Kak Rahma, Kak Tia, dan Ibu Fatma**, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam membantu penulis mengurus berbagai hal administrasi sejak maba hingga sekarang.
6. TERUNTUK GESREK. **Fara**, mungkin penulis tidak akan menjadi seperti sekarang kalau tidak kenal dirimu sejak maba. Besar kemungkinan penulis masih menjadi mahasiswa yang kaku dan kurang pergaulan. Terimakasih juga sudah jadi 'kakak' 24 jam selama di sini. Dari yang awalnya cerita hal-hal lucu tidak jelas, tiba-tiba bisa bicara topik serius. Penulis banyak belajar dari cerita, nasehat, dan

laranganmu hehe. Jangan lupakan penulis kalau dirimu sudah jauh di Jawa sana yah. **Pipri**, penulis banyak belajar jadi pribadi yang sabar berkat dirimu. Tapi jangan terlalu sabar juga, nanti sakit hati sendiri wkwk. Dirimu juga tempat curhat terbaik, tapi bukan tempat melucu terbaik, karena bagimu saya garing. Tidak apa. **Ony leony**, berhenti berkelahi dengan Pipri, sekali skali damai kan indah. Terimakasih atas kata-kata 'halus' nya sejak maba, sangat menguji kesabaran wkwkwk. Selalu jadi ony yang seperti sekarang, yang selalu bisa bikin ketawa. Terimakasih gesrek, *love you guys and for sure gonna miss you all*. Sukses di jalan masing-masing tapi tidak saling melupakan. Asik.

7. Alazhar di hati, bagi kalian yang selalu menemani sejak orens kotak-kotak sampai berubah jadi biru kotak-kotak, CCS tercinta (**Eka, Icha, Pucam, Kanu, Mita**) sampai tua yuk, hehe. **Sofi, Aya, Ayu, Sekar, Pute, Murtry, Jihan, Lulu, Mutia, Sisi, Qonita, Jane, Nurita, Jilan, Kiki, Amel, Rara, Kak Amar**, dan tentunya untuk semua teman-teman dan kakak-kakak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian.
8. KKN Posko Sulteng 1, tanpa covid kita tidak akan ketemu. Senang dan sangat bersyukur bisa kenal kalian, **Alifa** si Princess yang selalu heboh, **Ayy** yang selalu hadir dengan berbagai ide *game* nya, **Ronal** dengan ekspresinya yang selalu tidak terbaca, **Kak Wahyu** si manusia yang sulit ditebak, **Kak Puput** si ibu yang siap sedia mengurus anak-anak KKN nya dengan kehebohannya, **Kiran** si pintar tapi kadang bobrok lugu, **Kiki** si mageran yang susah untuk diajak ngumpul, dan si kordi

tercinta, **Meldrix**, si cool dan yang katanya tampan sejak bayi, terimakasih kepada kalian atas hari hari KKN nya. Alhamdulillah yah bisa kenal anak unhas dengan bahasa Palu juga sebelum sarjana.

9. Teruntuk **LIBERTE**, manusia manusia hebat yang dipertemukan sejak tahun 2017. Terimakasih atas cerita manis, lucu, sampai sedihnya. **Tama, Saf, Daus, Iun, Cini, Alya, Rafli, Wiwin, Dela, Tyas, Kiki besar dan Kiki kecil, Dian, Nisa, Uci, Mayang, Ulwi, Vivi, Putri, Risna, Nita, Cici, Dion, Imran, Alif, Fadil, Ai, Ayi, Isa**, dan teman-teman liberte lainnya yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu persatu.
10. Terimakasih juga untuk kakak-kakak angkatan yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal: **Kak Iyam, Kak Riri, Pa Aji, Kak Silvi, Kak Caca, Kak Adit, Kak Rizka, Kak Riz, Kak April, Kak Zul, Kak Eca**, dan semua kakak-kakak yang telah berkarir di luar sana.

Seperti halnya skripsi ini secara keseluruhan, ucapan terima kasih ini juga masih penuh dengan kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang penulis tanpa sengaja lupa untuk sebutkan. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena sudah terus berjuang dan tidak menyerah hingga bisa mencapai titik ini, *you made it!* Penulis tutup, semoga skripsi ini bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.

Makassar, Maret 2021



Rahmatia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR FIGUR	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Konseptual.....	6
1.5 Metode Penelitian	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Non-Governmental Organization (NGO).....	14
2.2 Konsep Track II Diplomacy.....	35
2.3 Konsep Penanganan Bencana Alam	41
BAB 3 Tsunami di Palu, ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine	52
3.1 Tsunami di Palu Tahun 2018	52
3.2 ActionAid.....	57
3.3 Yayasan Sikola Mombine	70
BAB 4 KERJASAMA TRANSNASIONAL ANTARA ACTIONAID DAN YAYASAN SIKOLA MOMBINE UNTUK PENANGANAN KORBAN BENCANA TSUNAMI DI PALU	79
4.1 Peran Yayasan Sikola Mombine sebagai Lembaga Non Pemerintah dalam Penanganan Korban Bencana Tsunami di Kota Palu Melalui Kerjasama Transnasional dengan ActionAid.....	80
4.2 Dampak Kerjasama Transnasional antara ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine dalam Penangan Korban Bencana Tsunami di Kota Palu	98
BAB 5 PENUTUP.....	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aktivitas NGO dalam Mitigasi Banjir di Republik Ceko	26
Tabel 2. Skenario ActionAid untuk Tahun 2020	61
Tabel 3. Data Program dan Penerima Manfaat - <i>Livehood</i>	93
Tabel 4. Data Program dan Penerima Manfaat - <i>Protection</i>	93
Tabel 5. Data Program dan Penerima Manfaat - <i>Shelters</i>	93
Tabel 6. Data Program dan Penerima Manfaat - <i>Food</i>	95
Tabel 7. Data Program dan Penerima Manfaat - <i>Wash</i>	96

DAFTAR FIGUR

Figur 1 Situasi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami oleh AHA Center.....	55
Figur 2 <i>Peta guncangan (shakemap) Gempabumi Donggala, Sulawesi Tengah...</i>	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Manajemen Bencana.....	42
Bagan 2. Sistem Penanggulangan Bencana	48
Bagan 3. Pola Kerjasama Transnasional antara YAPPIKA-ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan akan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Tercatat setidaknya terjadi bencana yang cukup besar setiap bulannya. Contohnya saja gempa bumi dengan kekuatan sekitar 5.0 dapat terjadi hampir setiap hari dan tidak jarang mengakibatkan bencana alam lainnya seperti longsor hingga tsunami. (Mercy Corps, 2020)

Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan akan bencana alam yaitu Sulawesi Tengah, khususnya untuk wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Hal tersebut disebabkan karena wilayah tersebut dilalui jalur sesar Palu Koro (Farisa, 2018). Sesar Palu Koro sendiri merupakan sebuah patahan yang membelah pulau Sulawesi menjadi dua, yang dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone. Pergerakan dari sesar ini mencapai 35 sampai 44 milimeter pertahun dan merupakan sesar paling aktif kedua di Indonesia setelah patahan Yapen di Papua (Wicaksono, 2018). Pergerakan sesar inilah yang menjadi penyebab terjadinya bencana tsunami dan gempa bumi di Kota Palu pada September 2018.

Pada 28 September 2018 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7.5 di dua wilayah di Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Gempa

tersebut menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di beberapa wilayah di Teluk Palu dengan ketinggian mencapai 3 meter. Gelombang tsunami tersebut terjadi secara tidak terduga karena hanya berselang beberapa menit setelah gempa terjadi. Tercatat ada lebih dari 537.000 penduduk terdampak dan sekitar 4.300 korban jiwa (Aránguiz, Esteban, Takagi, Mikami, & dkk, 2020). Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, pada hari yang sama juga terjadi likuifaksi di beberapa wilayah di Kota Palu. Likuifaksi merupakan sebuah fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat dari guncangan gempa yang terjadi sebelumnya (Samad & Yulizar Pramudika Tawil, 2019). Jumlah korban jiwa yang tidak sedikit dan banyaknya bangunan tempat tinggal hingga infrastruktur yang rusak, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.

Dalam penanggulangan sebuah bencana, sangat diperlukan respon dan pemulihan tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga dari pihak lainnya, seperti organisasi dan masyarakat itu sendiri. Ketiga pihak tersebut perlu untuk memperhatikan komponen-komponen tindakan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan bencana, mitigasi, evakuasi atau penyelamatan, rehabilitasi serta komunikasi yang dilakukan baik sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana. Adapun tujuan utama dari penanggulangan sebuah bencana yaitu untuk perlindungan masyarakat agar dapat mengurangi korban jiwa, korban terdampak, perbaikan ekonomi dan dampak lainnya. (Samad & Yulizar Pramudika Tawil, 2019)

Berdasarkan komponen-komponen tindakan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana alam, peran pemerintah yang terlihat hanya sebatas

pada evakuasi atau penyelamatan. Pihak-pihak seperti BNPB, TNI, Polri, dan pihak pemerintah lainnya berfokus pada upaya untuk mendata jumlah korban dan kerusakan, penyelamatan korban, serta pemulihan listrik dan komunikasi. Sedangkan bantuan seperti kebutuhan masyarakat di pengungsian cenderung mendapat perhatian yang kurang. Dari ketiga wilayah terdampak, hanya pemerintah Kabupaten Sigi yang dengan cepat meluncurkan dana tanggap darurat. Sedangkan pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala cenderung menunggu bantuan dari pihak luar. Adapun yang berperan besar dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yaitu dari berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya (Samad & Yulizar Pramudika Tawil, 2019). Salah satu lembaga non pemerintah yang aktif dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yaitu Yayasan Sikola Mombine.

Yayasan Sikola Mombine merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan yang didirikan pada tahun 2015. Sebagai sebuah lembaga berbasis kemanusiaan, lembaga ini juga ikut andil dalam penanganan bencana tsunami yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga ini tidak hanya sebatas pada pemberian bantuan berupa materi seperti kebutuhan pokok tetapi juga termasuk tindakan perlindungan dan pemberdayaan korban bencana terutama perempuan dan anak.

Tindakan penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine tersebut tentunya sangat diperlukan untuk membangun kembali masyarakat Kota Palu yang dapat terlepas dari trauma akan bencana

alam. Dalam menjalankan program-program tersebut, Yayasan Sikola Mombine bekerjasama dengan lembaga lainnya, baik lembaga non pemerintah dalam negeri maupun dari luar negeri (Sikola Mombine, 2020). Salah satu lembaga internasional yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Sikola Mombine yaitu ActionAid.

ActionAid merupakan sebuah lembaga internasional non-pemerintah yang bergerak untuk membebaskan dunia dari kemiskinan dan ketidakadilan. Lembaga ini khususnya berfokus dalam mencapai keadilan sosial dan kesetaraan gender dengan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam agar dapat tercipta lingkungan yang adil, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam prakteknya, lembaga ini menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi masyarakat sipil. Selain itu, lembaga ini juga secara aktif memberikan berbagai pelatihan, bantuan darurat, dan kampanye-kampanye sosial. (ActionAid, 2020)

Kerjasama transnasional antara ActionAid dan Yayasan Sikola tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi penanganan bencana tsunami Kota Palu. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait kerjasama transnasional yang dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine dalam penanganan bencana tsunami Kota Palu.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018 merupakan salah satu bencana alam terbesar dan terparah yang melanda Indonesia. Tidak hanya memakan korban jiwa yang cukup banyak dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah, namun bencana alam tersebut tidak hanya

terjadi di satu wilayah, tetapi 3 wilayah sekaligus, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, serta wilayah-wilayah lainnya di Sulawesi Tengah. Dalam penanganan sebuah bencana alam yang terjadi, tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan akan tetapi juga peran dari lembaga non pemerintah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine. Penelitian ini akan berfokus pada tindakan penanganan bencana yang dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine terhadap korban bencana tsunami Palu sejak bulan September 2018 hingga Agustus 2020.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran dan pola kerjasama transnasional antara Yayasan Sikola Mombine dan ActionAid dalam penanganan bencana tsunami Kota Palu ?
2. Bagaimana dampak dan pengaruh dari kerjasama transnasional Yayasan Sikola Mombine dan ActionAid terhadap penanganan bencana tsunami Kota Palu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran dan pola kerjasama transnasional antara Yayasan Sikola Mombine dan ActionAid dalam penanganan bencana tsunami Kota Palu.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak serta pengaruh dari kerjasama transnasional yang dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine terhadap tindakan penanganan bencana tsunami Kota Palu.

Berangkat dari tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai :

1. Dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam bidang kerjasama transnasional.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah terkait penanganan korban bencana alam.
3. Menjadi acuan bagi lembaga swadaya masyarakat lokal atau pihak lainnya yang ingin dan akan menjalin kerjasama transnasional.

1.4 Kerangka Konseptual

a. Non Governmental Organization (NGO)

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang berbasis non-profit dan dibentuk atas prinsip sukarela. Sebuah NGO dibentuk atas dorongan orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan pada umumnya berfokus pada isu-isu sosial dan kemanusiaan. NGO juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, memantau kebijakan hingga mendorong keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas politik. (Yaziji & Doh, 2009)

Sebagai lembaga yang bekerja untuk menciptakan perubahan dan perbaikan dalam sebuah masyarakat, lembaga ini kini menjadi salah satu pemain utama dalam pembangunan sebuah negara. Gerakan yang paling umum dan dasar dilakukan oleh sebuah NGO yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mengorganisis

kampanye publik yang dapat menciptakan sebuah perubahan. Tidak hanya itu, sebuah NGO juga dapat berperan penting dalam upaya tanggap darurat, membangun demokrasi, resolusi konflik, memperjuangkan hak asasi manusia, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, penyediaan informasi dan lain sebagainya. PBB memperkirakan ada lebih dari 35.000 NGO besar yang telah didirikan. Tetapi angka tersebut masih sebatas pada NGO yang tercatat secara resmi atau formal. Tidak sedikit NGO yang bersifat informal yang terdaftar sebagai penerima bantuan internasional. Peningkatan jumlah NGO yang ada di dunia telah terjadi sejak 1980-an, ketika lebih dari sebagian bantuan asing cenderung masuk ke pemerintah. Pada tahun 2004, tercatat NGO dapat bertanggung jawab atas sepertiga dari total bantuan asing. (Lewis & Kanji, 2020)

Sebuah NGO biasanya dicirikan dalam literatur sebagai organisasi independen yang tidak dipimpin oleh pemerintah atau tidak dijalankan atas dasar mencari keuntungan. NGO adalah kelompok organisasi yang sangat beragam yang menyebabkan sulitnya terjadi sebuah generalisasi. Dalam konteks struktural, sebuah NGO dapat berukuran besar atau kecil, bersifat forma atau informal, birokratis atau fleksibel. Sedangkan untuk hal pendanaan, NGO dapat didanai secara eksternal maupun sumber daya yang dimobilisasi secara lokal. Tidak sedikit NGO yang menerima dana bantuan dari pemerintah. (Lewis & Kanji, 2020)

Kata NGO sendiri tidak dapat terlepas dengan istilah bantuan kemanusiaan dan pekerjaan darurat. Tidak sedikit NGO yang didirikan bertujuan untuk menangani bencana dan berbagai situasi konflik. NGO

seperti ini cenderung memulai organisasi mereka sebagai lembaga yang bertujuan untuk menanggapi keadaan darurat dan kemudian turut memiliki peran sebagai pembangunan. (Claudia, 2017)

b. Track II Diplomacy

Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional terkadang belum mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh negaranya. Penyelesaian sebuah masalah ataupun pemenuhan sebuah tujuan nasional yang dilakukan oleh sebuah negara tidak jarang mengalami hambatan. Oleh karena itu aktor-aktor *non-state*, seperti NGO memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan internasional dewasa ini.

Dalam konsep diplomasi, dikenal adanya *Multy-Track Diplomacy*, yaitu konsep yang tidak hanya melihat negara dan perangkatnya sebagai aktor utama, tetapi aktor-aktor *non-state* turut memiliki andil yang cukup besar, baik aktor yang bersifat kelompok, profesional, maupun sebatas aktor individu. Bentuk diplomasi ini sering ditemukan penyelesaian isu-isu keadilan sosial-ekonomi, hak asasi manusia, dan berbagai upaya advokasi lainnya. (Alfadh, 2013)

Pada tahun 1982, Joseph Montville memperkenalkan konsep *Track II*, yaitu sebuah metode diplomasi non formal diluar pemerintah. Kunci dasar dari diplomasi ini adalah upaya untuk mencapai kepentingan tanpa perlu campur tangan dari pemerintah dan perangkat-perangkatnya. Awal munculnya asumsi ini yaitu saat maraknya kelompok-kelompok agama yang mulai ikut andil dalam membawa perubahan atau dinamika dalam

hubungan internasional dan juga besarnya peran kelompok-kelompok tersebut pada wilayah yang memiliki potensi konflik. Selain itu, pada tahun 1980 dan 1990 terjadi pergerakan diplomasi yang dilakukan oleh rakyat. (Diamond & McDonald, 1996)

Track II merupakan sebuah jalur para profesional yang berupaya dalam menganalisa, mencegah, dan menyelesaikan berbagai konflik internasional yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Jalur ini juga merupakan pelengkap bagi *Track I* dalam bidang aktivitas *soft politics*, seperti bidang pendidikan dan penanganan kasus HAM. Sebuah anggapan bahwa pemerintah cenderung bersifat otoriter dan korup, membuat *Track II* hadir sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan non-koersif, aman, dan mampu menciptakan persepsi dan mengeksplorasi ide bebas yang tidak dapat dilakukan dalam ranah pemerintah. Elemen-elemen yang termasuk dalam *Track II* ini seperti institusi agama atau akademik maupun NGO. (Cuthbert, 2005)

c. **Penanganan Bencana Alam**

Bencana alam merupakan sebuah fenomena yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini tidak hanya berdampak bagi lingkungan tetapi juga bagi manusia secara langsung. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini mengharuskan adanya kesiapan dalam menghadapi terjadinya bencana alam agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Kesiapan yang dimaksudkan yaitu bagaimana pemerintah dan setiap pihak yang terlibat

mampu melakukan penanganan bencana alam yang cepat, tanggap dan efektif.

Kata penanganan dalam KBBI memiliki arti cara, proses, atau perbuatan menangani. Sehingga dapat diartikan, penanganan bencana alam merupakan sebuah upaya dalam menangani berbagai dampak yang timbul akibat dari bencana alam yang terjadi. Letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi dan tsunami, gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan bencana alam lainnya. Berdasarkan data dari BNPB, tercatat lebih dari dua ribu bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu antara 2002-2005. (BNPB, 2005)

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari bencana alam tersebut dapat berupa kerusakan fisik, ekonomi, hingga sosial. Untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan, diperlukan adanya upaya tanggap darurat dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, informasi dan sumber daya manusia. Upaya-upaya tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan periode pasca bencana. Penanganan yang berkelanjutan merupakan elemen penting dalam meminimalkan tingkat kerusakan dan jumlah kerugian. Guna terciptanya strategi penanganan bencana yang dapat memberikan hasil yang maksimal, diperlukan adanya kerjasama antara berbagai stake holder, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, badan-badan usaha, dan penduduk melalui tindakan-

tindakan proaktif dan terencana serta harus ditekankan dalam waktu jangka panjang. (BNPB, 2009)

Strategi penanganan bencana alam yang disusun tersebut semakin didukung dengan adanya penetapan UU, yaitu UU No. 24 tahun 2007 (selanjutnya disebut “UU No.24”) . Peraturan tersebut disusun untuk memperkuat kerangka kerja penanganan bencana di Indonesia secara hukum dan kelembagaan. Dengan adanya peraturan ini, Indonesia diharapkan mampu menghadapi bencana besar yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu, strategi tersebut juga disusun untuk meminimalkan jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi berulang-ulang, seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, bencana banjir, dan kebakaran hutan. Strategi tersebut juga disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.

Strategi penanganan bencana alam yang disusun tersebut terdiri atas empat bagian: Bagian 1 membahas tindakan prinsip umum dari penanggulangan bencana, Bagian 2 dan 3 menjelaskan tindakan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi dan badai. Pada dua bagian ini, dikhususkan untuk perencanaan penanganan pra-bencana, tanggap darurat dan tahapan pasca-bencana, dengan bercermin pada urutan bencana dan tingkat kepentingan penanggulangannya. Terakhir pada Bagian 4 dikhususkan membahas strategi dalam penanganan pasca bencana. (BNPB, 2009)

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk kerjasama transnasional sebuah yayasan lokal yaitu Yayasan Sikola Mombine, oleh karena itu jenis penelitian yang tepat untuk penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell (1998) merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penemuan yang proses pencapaiannya tidak menggunakan prosedur statistik atau cara pengukuran lainnya. Jenis penelitian ini umumnya digunakan dalam penelitian yang berfokus untuk memahami kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lainnya. (Creswell, 1998)

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai sebuah proses untuk memperoleh data empiris melalui responden ataupun sumber lainnya dengan metode tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *library research*. Metode *library research* yaitu metode pencarian sumber data yang berdasarkan pada riset kepustakaan, buku-buku terkait, data dan informasi dari instansi terkait serta tulisan lainnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan salah satu staf di Yayasan Sikola Mombine yang ikut terlibat dalam penanganan korban bencana tsunami di Palu. (Suyanto & Sutinah, 2005)

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data primer ini didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau dengan kata lain data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. (Hendri, 2009)

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Pemilihan teknik ini karena data-data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data empiris berupa kumpulan kata, baik dari hasil studi pustaka maupun wawancara, dan bukan merupakan data serangkaian angka. Adapun teknik analisis data ini terdiri atas tiga tahapan. Pertama, reduksi data atau pengumpulan data-data yang mendukung penelitian kemudian diperiksa data yang benar dan tepat. Kedua, mengolah data yang telah dipilah agar bisa diolah sesuai kebutuhan. Ketiga, menarik kesimpulan atau menganalisa serta menginterpretasikan melalui tulisan dalam penelitian ini. (Silalahi, 2006)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Non-Governmental Organization (NGO)

Istilah *Non-Governmental Organization* (NGO) belum secara resmi digunakan sebelum terbentuknya PBB. Tercatat ada 132 organisasi non pemerintah yang menjalin sebuah kerjasama internasional di bawah label *Union of International Associations* pada tahun 1910. Pada draf pertama Piagam PBB tidak menyebutkan adanya pemeliharaan kerjasama dengan badan-badan swasta, sehingga berbagai kelompok berupaya untuk melakukan lobi agar dilakukan perubahan terhadap draf tersebut pada konferensi San Francisco. (Willets, 2002)

Upaya tersebut menghasilkan ketentuan-ketentuan untuk memperkuat dan secara resmi mensahkan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi swasta. Istilah NGO kemudian secara resmi digunakan sebagai sebutan untuk organisasi non pemerintah sejak tahun 1970. Tidak ada definisi pasti untuk menjelaskan NGO dan istilah tersebut hingga kini memiliki konotasi yang berbeda bergantung pada keadaan dari NGO itu sendiri. Akan tetapi, NGO memiliki ciri utama yakni sebuah organisasi independen yang tidak dikendalikan secara langsung oleh pemerintah. (Willets, 2002)

Oxfam, Greenpeace, Amnesty International, dan ribuan organisasi lainnya merupakan contoh dari organisasi yang berfokus pada pelayanan publik, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebelum secara resmi disebut sebagai NGO, organisasi-organisasi ini awalnya menyebut diri mereka sebagai "*private voluntary organizations*", "*civil society*

organizations", dan "*citizen associations*". PBB secara resmi menggunakan istilah NGO dengan tujuan untuk membedakan organisasi-organisasi tersebut dengan organisasi berbasis pemerintah. NGO dianggap sebagai sebuah fenomena baru yang mulai berkembang setelah meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap topik hak kewarganegaraan di Eropa dan Amerika pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Pada awal perkembangannya, NGO dianggap dapat menjadi sebuah instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan atau mempromosikan sebuah kebijakan baru. (Paul, 1996)

Banyak dari teori pembangunan dan sebagian besar *aid-agencies* menjadikan NGO sebagai kunci utama dalam strategi pembangunan kontemporer. Sejak tahun 1980-an, jumlah NGO yang terbentuk mengalami peningkatan yang sangat drastis. Tidak hanya itu, tugas dan fungsi dari sebuah NGO juga semakin beragam yang secara otomatis jumlah anggaran yang dikelola ikut mengalami peningkatan. Terjadi pula pergeseran orientasi peran yang signifikan dari yang awalnya merupakan kegiatan amal ke peran sebagai agen pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial dan budaya. Namun, tidak sedikit NGO yang hanya berfokus pada isu-isu kampanye dan advokasi hingga menjadikannya sebagai aktivitas utama mereka (Holmen & Jirstrom, 2009). Sehingga, pada perkembangannya NGO kemudian dijadikan sebagai agen kunci dalam pembawa perubahan.

Banyak alasan yang mendukung pemberian label NGO sebagai agen kunci. Alasan pertama yaitu NGO memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan organisasi pemerintah dan bisnis, contohnya saja pada keunggulan

fleksibilitas, menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif, merencanakan dan melakukan kegiatan yang efektif, jejaring yang lebih luas, mampu dan terbiasa menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas akar rumput, dll. *Kedua*, NGO memiliki peran sebagai lembaga perantara atau *mediating structures* yang menjadikannya mampu menjadi penghubung antara kepentingan negara dan masyarakat. *Ketiga*, aktif dan efektifnya berbagai kegiatan NGO dianggap dapat menghasilkan masyarakat sipil yang kuat dan demokratis. (Suharko, 2003)

Sebuah NGO memiliki sifat-sifat mendasar, yaitu organisasi yang tidak berdasarkan pada pencarian laba, organisasi non-pemerintah, terorganisir, independen, dan sukarela. Berikut uraian dari sifat-sifat tersebut : (WANGO, 2020)

a. Non-Profit

- *Not-For-Profit*

NGO diorganisir dan dioperasikan sebagai organisasi non-profit. Setiap keuntungan atau surplus yang dihasilkan melalui kegiatan operasional akan digunakan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan misi dari NGO tersebut. Dengan kata lain, keuntungan yang didapatkan tidak dipergunakan untuk disumbangkan kepada para pejabat organisasi.

- *Trade or Business*

NGO tidak boleh dijalankan atau dioperasikan untuk tujuan utama sebagai organisasi perdagangan atau bisnis.

- *Governing Instrument*

Sebuah NGO memiliki instrumen yang mengatur organisasi dalam mencegah pendistribusian keuntungan atau aset demi kepentingan individu baik selama organisasi tersebut masih aktif dan saat organisasi tersebut diberhentikan.

b. Non-Pemerintah

- *Non-Governmental*

Organisasi ini tidak boleh menjadi bagian dari, atau dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga antar-pemerintah.

- *Politically Independent*

Organisasi harus menjaga independensi dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun meskipun NGO tersebut dalam misi, tujuan, dan struktur hukumnya memiliki alasan politik atau legislatif. Contohnya sebuah organisasi bebas pajak di Amerika Serikat yang dilarang untuk ikut berpartisipasi atau campur tangan dalam upaya untuk mempengaruhi undang-undang, berpartisipasi dalam kampanye politik, baik untuk mendukung ataupun menentang kandidat untuk jabatan politik. Akan tetapi, hal ini tidak membatasi NGO dalam melakukan kegiatan politik dan legislatif selama kegiatan tersebut hanya sebatas pada pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan diizinkan.

- *Foreign Policy*

Sebuah NGO tidak dapat bertindak sebagai instrumen kebijakan luar negeri pemerintah, tetapi bertindak secara independen dari

pemerintah. NGO tidak diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan pemerintah manapun. Terkecuali jika kebijakan tersebut sesuai dengan misi dan kebijakan independen organisasi itu sendiri.

c. Terorganisir

- *Organizing Features*

NGO diharuskan memiliki dokumen pengorganisasian, dewan eksekutif, pejabat, dan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara rutin.

- *Organizing Documents*

Dokumen penyelenggara, seperti anggaran rumah tangga, konstitusi tertulis, atau memorandum asosiasi, harus secara jelas menjabarkan misi, tujuan, struktur organisasi, hak dan kewajiban keanggotaan jika ada, dan aturan prosedur.

- *Legal Recognition*

Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dipegang oleh sebuah NGO tetap dapat berlaku terlepas dari apakah organisasi tersebut diakui secara hukum oleh pemerintah manapun atau tidak.

d. Independen dan Pemerintahan Sendiri

- Independen

Organisasi harus bersifat independen. Seluruh kebijakan, visi, dan kegiatannya tidak boleh ditentukan oleh perusahaan nirlaba, donor, pemerintah, pejabat pemerintah, partai politik, atau bahkan organisasi lainnya.

- Pemerintahan Sendiri

Organisasi harus mampu mengatur dirinya sendiri secara otonom sesuai dengan struktur tata kelola yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Instrumen tersebut penting untuk mengontrol aktivitasnya sendiri.

- e. Sukarela

- *Voluntary Values and Principles*

Sebuah NGO dibentuk dan didirikan atas dasar inisiatif individu atau kelompok yang merupakan hasil dari tindakan sukarela untuk mengejar kepentingan bersama. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip sukarela merupakan kunci utama bagi sebuah NGO.

- *Contributions from Volunteers*

Untuk mencapai misi dan tujuannya, relawan memiliki kontribusi dan andil yang sangat besar. Pihak-pihak tersebut tergolong dalam kelompok sasaran dan pendukung organisasi.

- *Volunteerism of Governing Board*

Para penggiat organisasi, termasuk para dewan direksi hingga anggota, harus melayani atas dasar sukarela tanpa bayaran.

Misi dari sebuah organisasi merupakan landasan dan tujuan mengapa sebuah NGO didirikan. Misi yang terdefinisi dengan baik tersebut dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan semua kegiatan dan perencanaan organisasi. Sebuah NGO memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (WANGO, 2020).

a. Landasan Misi

- Pernyataan Formal atau Tertulis

Sebuah NGO harus secara resmi dan ringkas menyatakan dan menjabarkan misinya dalam sebuah pernyataan tertulis yang disetujui oleh badan pengelola NGO tersebut.

- *Public Availability*

Pernyataan tertulis dari misi sebuah NGO harus tersedia atau dapat diakses secara terbuka oleh semua pejabat organisasi, anggota, staf, mitra, pihak donor, penerima manfaat program, serta masyarakat pada umumnya.

- Evaluasi

Misi NGO tidak terlepas dari evaluasi melalui kegiatan review yang dilakukan secara periodik (setiap dua atau tiga tahun) untuk menentukan apakah misi tersebut masih relevan. Isu-isu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah misi tersebut masih relevan atau tidak yaitu : (a) apakah misi tersebut telah terpenuhi, baik oleh organisasi atau entitas lain, dan dengan demikian apakah ada kebutuhan untuk organisasi seperti saat ini untuk terus ada; (b) apakah misi harus direvisi untuk mencerminkan perubahan masyarakat; (c) apakah ada keinginan bagi organisasi untuk menangani kebutuhan baru yang mungkin memerlukan pernyataan misi baru.

b. Kegiatan

- Konsistensi dengan Misi

Kegiatan yang dilakukan dan direncanakan oleh NGO harus secara konsisten sejalan dengan misi dari NGO tersebut. Misi NGO dimaksudkan sebagai landasan perencanaan strategis dan cetak biru dari kegiatan organisasi. Fokus NGO harus diarahkan untuk memastikan bahwa tujuan yang akan dicapai dapat terpenuhi.

- Efektif dan Efisien

Program organisasi harus bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.

- Umpan Balik

Organisasi harus secara aktif dan teratur dalam mencari umpan balik terkait program dan kegiatan yang dilakukan. Umpan balik yang dimaksudkan dapat berasal dari penerima proyek, serta pemangku kepentingan lainnya.

- Evaluasi

Kegiatan organisasi harus diperiksa secara kritis secara berkala untuk menentukan relevansinya dengan misi, efisiensi dan efektivitasnya, serta nilai untuk kemudian dipertimbangkan apakah akan melanjutkan program atau merevisinya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut : (a) apakah kegiatan tersebut sesuai dengan misi organisasi saat ini atau apakah kegiatan tersebut perlu direvisi atau dihentikan sehubungan dengan perubahan misi; (b) efisiensi dan efektivitas program dalam mencapai tujuan

organisasi; (c) hasil bagi penerima program; (d) biaya program relatif terhadap hasil, dan; (e) apakah layanan baru harus ditawarkan melalui evaluasi yang terbuka dan jujur, serta mencakup masukan dari pemangku kepentingan.

- Profesionalisme

Organisasi harus menjalankan aktivitasnya secara profesional dan berpusat pada landasan demi kepentingan bersama.

- Persentase Pengeluaran

Organisasi harus dan wajib menghabiskan setidaknya 65% dari keseluruhan pengeluaran (termasuk biaya penggalangan dana) untuk kegiatan program, dan idealnya dapat mencapai lebih dari 80%. Apabila sebuah NGO tidak dapat memenuhi standar 65% tersebut, organisasi tersebut perlu memberikan alasan mengapa angka pengeluaran hanya terbatas angka yang ada. Penjelasan yang mungkin untuk tidak memenuhi standar tersebut bisa jadi dikarenakan biaya administrasi dan penggalangan dana yang lebih tinggi dari organisasi dan pengecualian terkait dengan pembatasan donor atau faktor politik dan sosial yang tidak biasa.

NGO terbagi atas berbagai tipe yang didasarkan pada orientasinya dan tingkat operasinya. Berikut tipe-tipe NGO :

a. NGO Berdasarkan Orientasi

- *Charitable Orientation*, yaitu NGO yang sering terlibat dalam kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat terdampak bencana alam atau bencana akibat

ulah manusia. Tipe ini juga secara khusus sangat sedikit melibatkan partisipasi dari “penerima bantuan” dalam program yang dilakukan. Bantuan yang diberikan dapat berupa pendistribusian makanan, pakaian, obat-obatan, penyediaan perumahan, transportasi, sekolah, dan lain sebagainya.

- *Service Orientation*, yaitu NGO yang kegiatannya berupa penyediaan layanan kesehatan, perencanaan keluarga atau layanan pendidikan yang dimana program-program tersebut dirancang langsung oleh NGO terkait. Perbedaan tipe ini dengan *charitable orientation* yaitu tipe ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programnya dan dalam proses penerimaan layanan atau bantuan tersebut.
- *Participatory Orientation*, yaitu NGO yang menyelenggarakan proyek-proyek swadaya, yang dimana masyarakat setempat berperan penting dalam pelaksanaannya. Peran tersebut dapat berupa memberikan sumbangan uang tunai, peralatan, tanah, material, tenaga kerja, dll. Pada tahapan awal pelaksanaan proyek, masyarakat telah terlibat aktif dalam penentuan kebutuhan yang akan menjadi tujuan utama proyek dan kemudian berlanjut ke perencanaan dan tahapan implementasi. Koperasi merupakan salah pihak yang terlibat aktif dalam proyek-proyek NGO ini.
- *Empowering Orientation*, yaitu NGO yang memiliki tujuan utama yaitu membantu masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan pemahaman mereka terkait faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi

yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka, dan untuk memperkuat kesadaran mereka akan potensi kekuatan mereka sendiri untuk mengontrol kehidupan mereka. NGO dengan tipe ini pada umumnya terbentuk secara spontan dalam suatu lingkungan masyarakat yang memiliki masalah atau isu tertentu. Tidak hanya NGO, pada pelaksanaannya kelompok ini juga dibantu oleh pihak di luar NGO yang biasanya berperan sebagai fasilitator. Namun tetap menekankan pada partisipasi NGO sebagai fasilitator utama.

b. NGO Berdasarkan Tingkat Operasi

- *Community-based Organizations (CBOs)*, yaitu NGO yang terbentuk atas inisiatif sebuah kelompok. Kelompok-kelompok yang dimaksud seperti klub olahraga, organisasi wanita, organisasi lingkungan, organisasi keagamaan atau pendidikan, dll. NGO seperti ini sangat banyak dan beberapa diantaranya mendapatkan dukungan dari NGO lokal lain, NGO nasional, NGO internasional, atau bahkan dari lembaga bilateral atau internasional, dan tidak sedikit pula yang tidak bergantung pada bantuan luar. NGO ini berfokus pada pengabdian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin kota atau membantu mereka memahami hak-hak mereka dalam mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.
- *Citywide Organizations*, tipe ini memiliki kesamaan dengan tipe *community-based organizations (CBOs)* akan tetapi NGO dengan tipe ini memiliki tujuan dan cakupan manfaat atau target yang lebih luas. Contoh dari NGO dengan tipe ini yaitu *Rotary International*,

Lion's Club, koalisi bisnis, kelompok etnis atau pendidikan, asosiasi organisasi komunitas, dll. NGO ini pada umumnya berfokus pada membantu masyarakat kurang mampu.

- *National* NGOs, seperti namanya, NGO ini bekerja secara nasional. NGO yang termasuk dalam tipe ini yaitu Palang Merah, YMCAs/YWCAs, berbagai organisasi profesional, dll. Beberapa dari NGO ini juga memiliki cabang di beberapa negara bagian yang bertugas membantu NGO lokal di negara bagian tersebut.
- *International* NGOs, tipe ini mencakup NGO yang lebih luas, mulai dari lembaga sekuler seperti *Save the Children Organizations*, OXFAM, CARE, Ford dan *Rockefeller Foundations* hingga kelompok keagamaan. NGO dengan tipe ini memiliki berbagai kegiatan, terutama mendanai NGO lokal, lembaga dan proyek, hingga bahkan sampai pada tahapan membantu pelaksanaan proyek tersebut. (William, 1991)

NGO yang termasuk dalam kategori *charitable orientation* secara khusus merupakan NGO yang berfokus pada pemberian dan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini termasuk pada saat terjadinya bencana alam. NGO memiliki peran yang sangat besar pada saat bencana alam terjadi. Sebagai salah satu elemen dalam *civil society*, keterlibatan NGO sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah dan badan pemerintah lainnya untuk menanggulangi berbagai dampak yang ditimbulkan dari bencana alam. Untuk menggambarkan peran NGO dalam penanganan bencana alam, penulis mengangkat tulisan Kurnia Novianti yang berjudul

Peran NGO sebagai Bagian dari *Civil Society* dalam Mitigasi Banjir di Praha. Dalam tulisannya, Kurnia menjabarkan aktivitas berbagai NGO Lingkungan dalam menangani banjir di Republik Ceko, berikut aktivitas NGO tersebut yang dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Aktivitas NGO dalam Mitigasi Banjir di Republik Ceko

Nama NGO	Rutinitas Organisasi			Implementasi rutinitas dalam merespon banjir
	Target	Strategi	Frame	
Greenpeace	Negara	<i>Watchdog</i> , aksi langsung	Peraturan yang lemah, konsumsi yang berlebihan.	Melakukan aksi langsung untuk menunjukkan bahaya akan banjir. Menawarkan untuk mengirim tenaga relawan. Publikasi dan perhatian pada media.
Arnika (<i>toxic programme</i>)	Negara	<i>Watchdog</i>	Pemerintah tidak menaruh perhatian yang cukup.	<i>Promoting stricter. Environmental regulations.</i> Mempertanyakan lebih lanjut tentang pembangunan bendungan dekat Sungai Labe.

				<i>Press release</i> dan publikasi tentang racun (<i>toxic</i>).
Arnika (<i>land use programme</i>)	Negara	<i>Watchdog</i>	Pemerintah tidak menaruh perhatian yang cukup.	Mengubah perencanaan tata guna tanah. Menciptakan inventarisasi gedung dalam <i>floodplains</i> .
Hnuti Duha	Negara	Advokasi dan Lobi	<i>Robust policy</i> menjadi kritikal	Bekerja pada sektor hukum (<i>Anti-Flood Law</i>) sejak 2002
CSOP (Usti)	Komunitas	<i>Local development</i>	Melindungi alam/lingkungan	Memobilisasi para relawan dengan kegiatan membersihkan
CSOP (Troja)	Komunitas	<i>Local development/</i> implementasi kebijakan	Melindungi alam/lingkungan dan pendidikan bagi anak muda	Memobilisasi para relawan untuk membersihkan Royal Island. Partisipasi dalam keputusan membangun bendungan. Berdiskusi dengan orang-orang pemerintahan

				tentang Rencana Tata Guna Lahan.
The Civic Association of Inhabitants of Neratovice	Pemerintah lokal	Memobilisasi warga bagi pembangunan daerah	Perlindungan wilayah lokal	Memobilisasi warga tentang pembangunan di <i>flood plains</i> .
The Civil Association of Malse	Perintah lokal	Memobilisasi warga bagi pembangunan daerah	Pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan penduduk lokal	Diskusi yang masih berjalan tentang Rencana Tata Guna Lahan dan pentingnya keterlibatan masyarakat.

Kurnia menjelaskan bahwa NGO memiliki peran yang cukup penting dalam mitigasi banjir di Republik Ceko. Peran tersebut dapat terlihat dalam berbagai kegiatan seperti memberikan pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat, menjadi pendamping masyarakat, dan mengkritisi jalanannya pemerintahan. Peran-peran tersebut tentunya sejalan dengan nilai ideologis dan kepentingan dari sebuah NGO. Melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, lobi, penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain, NGO tidak hanya menyebarkan informasi tentang isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat, tetapi juga mengupayakan tercapainya solusi atas sebuah permasalahan.

Terlihat pula dalam mitigas banjir di Republik Ceko tersebut berbagai aktor yang terlibat berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk menunjukkan kontribusi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap NGO didasarkan pada kepentingan dan bahkan ideologi masing-masing NGO. Sehingga, sekalipun berbagai NGO dan elemen lain bekerjasama dalam sebuah aktivitas, tidak menjamin perdebatan atau perbedaan tidak akan terjadi. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam relasi antaraktor. Sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sebuah NGO tidak dapat terpisah dari kepentingan dan nilai ideologis yang dimilikinya. Sifat bantuan yang diberikan juga beraneka ragam, ada yang bersifat jangka panjang, dan ada pula yang hanya bersifat jangka pendek dan *accidental*. Tidak hanya nilai ideologi dan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan tetapi juga pengaruh-pengaruh dari elemen masyarakat lain, seperti kerangka pikir (*frame*) yang melatarbelakanginya. (Novianti, 2013)

Selain tipe-tipe NGO di atas, NGO juga dapat dibagi menjadi beberapa tipe di bawah ini (Folger, 2020) :

- a. BINGO : *Big International* NGO, contohnya yaitu *The Red Cross*
- b. ENGO : *Environmental* NGO, contohnya *Greenpeace* dan *World Wildlife Fund (WWF)*
- c. GONGO : *Government-organized* NGO, contohnya yaitu *The International Union for Conservation of Nature*
- d. INGO : *International* NGO, contohnya yaitu *Oxfam*

- e. QUANGO : *Quasi-NGO*, contohnya yaitu *The International Organization for Standardization*

Salah satu faktor utama sebuah organisasi dapat berdiri dan bekerja yaitu adanya dukungan biaya operasional yang memadai. Untuk mendanai biaya operasional dan program dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi, sebagian besar NGO menggalang dana dari luar organisasinya dengan mencari dukungan keuangan secara sukarela, seperti dari yayasan, donor perorangan, dan lembaga pemerintah. Akan tetapi, dukungan keuangan tersebut bukan sekedar perpindahan uang antara dua pihak saja. Sumber atau donor kepada sebuah NGO merupakan sebuah hubungan dua arah yang melibatkan nilai dan kewajiban, terutama kepada penerima manfaat. Sebagai penerima dana, NGO perlu untuk secara terbuka dan transparan, bertanggung jawab kepada donor, menggunakan dana secara bertanggung jawab dan sesuai dengan maksud dan tujuan donor, dan memberikan akses kepada individu dan organisasi pemberi dana untuk dapat memiliki wawasan terkait proyek atau program yang akan dilaksanakan. (WANGO, 2020)

Seperti halnya individu yang tidak dapat bertahan hidup tanpa individu lain, sebuah organisasi, termasuk NGO, dapat terus beroperasi dengan bantuan pihak lain. Sebuah NGO dapat membentuk sebuah hubungan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, pemerintah dan badan antar pemerintah. Tidak menutup kemungkinan, sebuah NGO juga dapat bekerjasama dengan perusahaan nirlaba yang dapat memberikan manfaat dalam memajukan tujuan yang terkait dengan misi organisasi. berikut uraian

terkait kemitraan, kolaborasi, dan jaringan dari sebuah NGO : (WANGO, 2020)

a. Prinsip Umum Kemitraan dan Kolaborasi

- *Mission Consistency*

Organisasi dapat menjalin hubungan kerjasama atau berkolaborasi dengan entitas lain hanya jika keduanya memiliki kesesuaian misi dan tujuan.

- *Shared Values*

Hubungan kerjasama yang dibangun harus berdasarkan pada nilai-nilai bersama, kesamaan, dan untuk kebaikan masyarakat.

- *Mutual Benefit*

NGO harus berkolaborasi atas dasar saling menguntungkan secara adil dan tulus bagi setiap pihak yang terlibat.

- *Transparancy NGO*

Sangat diperlukan adanya transparansi keuangan dan arus informasi, gagasan, dan pengalaman dua arah.

- *Adaptive to Change*

Hubungan kolaborasi yang dibangun sejalan dengan sikap adaptif terhadap perubahan. Perubahan dalam hubungan tersebut harus dikembangkan melalui kerjasama dan tidak dipaksakan oleh pihak lainnya.

b. Hubungan dengan NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil Lainnya

- *Common Objectives*

Sebuah NGO dan NGO lainnya dapat membangun kerjasama apabila keduanya memiliki misi, nilai, dan kelompok sasaran yang sama. Hubungan kerjasama tersebut dapat bermanfaat terutama bagi kelompok sasaran dan untuk mempermudah pencapaian tujuan bersama.

- *Competition and Service Duplication*

NGO dengan misi, nilai-nilai, dan kelompok sasaran yang sama sebaiknya tidak saling bersaing satu sama lain dan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, serta perlu menahan diri dari pengadaan program yang tidak diperlukan dan gangguan proyek masing-masing.

- *Information Sharing*

NGO dengan misi, nilai-nilai, dan kelompok sasaran yang sama harus saling berbagi informasi proyek atau program yang relevan dengan NGO lain dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk saling mendukung satu sama lain.

- *Support for Other NGOs*

Sebuah NGO juga perlu mengedepankan solidaritas terhadap kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh NGO lainnya, serta ikut mempromosikan efektivitas dan keberhasilan NGO tersebut, selama tujuan yang akan dicapai oleh kedua pihak tidak saling membahayakan nilai-nilai yang dianut oleh satu sama lain.

- *Networking*

Organisasi harus mampu membangun jejaring dengan organisasi lainnya dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi dari sektor NGO dan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan publik.

c. Hubungan dengan Pemerintah dan Badan antar Pemerintah

- *NGO Objectives and Independence*

Organisasi harus menyusun perjanjian kemitraan dengan pemerintah atau badan antar pemerintah hanya jika hubungan kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam pencapaian tujuan serta tidak mengganggu kemandirian atau independensi organisasi.

- *Appropriate and Mutually Beneficial*

Organisasi harus berusaha untuk membuka ruang dialog dan bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga antar pemerintah apabila kerjasama tersebut sesuai dan saling menguntungkan bagi kedua pihak, serta dapat meningkatkan efektivitas NGO dalam menangani masalah dan prioritas agendanya.

- *Mission-led*

Organisasi tidak boleh menjalin kemitraan dengan badan pemerintah atau antar pemerintah semata-mata untuk mempromosikan keberlanjutan atau keunggulan kompetitif NGO secara independen dalam pencapaian misi dan tujuannya.

- *Political Favor*

Organisasi tidak boleh mengubah kebijakannya atau sifat non-partisan untuk mendapatkan keuntungan politik.

- d. Hubungan dengan Perusahaan Nirlaba

- *NGO Objectives and Independence*

Sebuah NGO diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan nirlaba hanya jika bermanfaat bagi pencapaian tujuan NGO dan tidak mengganggu independensi organisasi.

- *Mission-led*

Tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak relevan dengan pencapaian misi dan tujuan tidak boleh digunakan sebagai motivasi untuk menjalin kolaborasi.

- *Market Advantage*

Organisasi tidak boleh menjalin kerjasama dengan perusahaan nirlaba apabila perusahaan nirlaba tersebut memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan pasar dari hasil persaingan.

Pada penelitian ini penulis secara spesifik akan menggunakan konsep NGO yang dijelaskan oleh William dalam tulisannya. Selain itu, penulis juga akan mengacu pada tulisan yang dimuat pada laman resmi *World Association of Non-Governmental Organization (WANGO)* dan tulisan oleh Kurnia Novianti. Penjelasan terkait NGO yang dikemukakan oleh William dan yang dimuat dalam laman resmi WANGO serta tulisan oleh Kurnia Novianti tersebut akan penulis gunakan sebagai landasan dalam menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat.

2.2 Konsep Track II Diplomacy

Diplomasi merupakan kunci utama dalam terjalinnya hubungan kerjasama, baik antara pihak negara dan negara, negara dan organisasi, ataupun antara organisasi dan organisasi. Oleh karena itu diplomasi dianggap sebagai instrumen penting dalam tercapainya sebuah tujuan atau kepentingan. Secara umum, diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah metode yang efektif untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pihak lain (pemerintah ataupun masyarakat). Metode tersebut dapat dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lain dan merupakan pilihan utama dalam upaya penyelesaian suatu isu ketimbang langkah perang atau kekerasan. (Freeman & Marks, 2020)

Bruce Russetts dan Harvey Star mendefinisikan diplomasi melalui kutipan “*a means by which a state directly influences another*”. Maksud dari kutipan tersebut yaitu, diplomasi merupakan metode, alat, instrumen, atau apapun bentuknya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara lain secara langsung. Adapun alat yang dapat digunakan pada proses diplomasi tersebut bergantung pada apa yang dimiliki oleh negara tersebut dan kepentingan serta tujuan apa yang ingin dicapai (Dahlan & Herningtyas, 2007). Masih banyak definisi diplomasi menurut para ahli yang secara garis besar hanya menekankan pada aktivitas penyelesaian masalah atau upaya mencapai tujuan yang dilakukan secara formal oleh negara dengan negara. Sedangkan dewasa ini, isu-isu yang terjadi di dunia tidak hanya sebatas pada isu-isu negara saja. Bahkan tidak sedikit isu-isu yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh negara. Oleh karena itu konsep *Track II Diplomacy* kemudian lahir.

Pada konflik-konflik yang sulit diselesaikan, instrumen diplomasi tradisional, seperti mediasi dan manajemen konflik terbukti kurang efektif. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dikarenakan konflik tersebut belum “matang” untuk diselesaikan. Atau dengan kata lain, salah satu atau bahkan kedua belah pihak tidak memiliki motif yang kuat untuk menurunkan ketegangan dikarenakan mereka percaya bahwa biaya untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh dari penyelesaian tersebut.

Para akademisi dan praktisi di bidang resolusi konflik menunjukkan batasan tambahan dari diplomasi tradisional yang sangat cocok untuk ditangani oleh perantara informal. Salah satunya yaitu mereka meyakini bahwa konflik yang ada sulit diselesaikan karena cenderung melibatkan kebutuhan dasar manusia dan nilai-nilai yang dialami para pihak sebagai hal penting untuk kelangsungan hidup mereka, dan sebagai konsekuensinya menjadikan sulit untuk dinegosiasikan. Proses negosiasi dan mediasi tradisional sangat cocok untuk menyelesaikan isu kemanusiaan, seperti kemiskinan, kontrol atas tanah, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. (Chigas, 2003)

Isu-isu global yang terjadi tidak dapat sepenuhnya diperdebatkan atau dibebankan secara politis kepada pemerintah untuk diselesaikan. Diplomasi informal atau *Track II Diplomacy* dianggap dapat membantu menjaga dan memperkuat jalur komunikasi terkait masalah atau isu yang terjadi pada hubungan bilateral dan organisasi internasional. Isu perubahan iklim dan pembangunan ekonomi merupakan contoh topik permasalahan yang

tergolong sulit untuk didiskusikan. Setiap negara tentunya menginginkan pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya sambil memberikan dampak sekecil mungkin bagi warganya.

Salah satu kekurangan dari *Track I* yaitu adanya perbedaan kebijakan yang dapat berubah karena adanya pergantian rezim kepemimpinan. Hal tersebut menciptakan kurangnya kesinambungan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam *Track I* tradisional. Diplomasi *Track II* bukan hadir untuk menggantikan *Track I*, melainkan sebagai instrumen pelengkap yang didasarkan pada gagasan bahwa para pemikir diluar agenda resmi pemerintah dapat ikut andil dalam memajukan dan memperjuangkan kepentingan nasional serta dapat menemukan titik temu kerjasama yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara. (Obern, 2018)

Istilah lain yang digunakan selain *Track II Diplomacy* ini yaitu *citizen diplomacy*, *multi-track diplomacy*, *supplemental diplomacy*, *pre-negotiation*, *consultation*, *interactive conflict resolution*, *back-channel diplomacy*, *faciliated joint brainstorming*, dan *coexistence work*. Walaupun terdapat perbedaan pada penekanan, agenda, dan pendekatan teoritis, semua kegiatan diplomasi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan lingkungan yang tidak saling menghakimi, tidak memaksa, dan aman, guna terjadi proses dimana peserta merasa bebas untuk berbagi persepsi, ketakutan dan kebutuhan, dan untuk mengeksplorasi ide sebagai solusi, dan terutama bebas dari kendala yang dihadapi oleh pemerintah.

Proses tersebut dirancang untuk mendorong pengembangan pemahaman timbal balik atas perbedaan persepsi dan kebutuhan, penciptaan

ide-ide baru, dan hubungan pemecahan masalah yang kuat. Adapun aktor-aktor informal dalam *Track II* tersebut yaitu aktor-aktor non-pemerintah, seperti lembaga keagamaan, akademisi, mantan pejabat pemerintah, NGO, organisasi kemanusiaan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, pemerintah atau pejabat pemerintah dapat bertindak sebagai aktor informal ketika memfasilitasi diskusi antara aktor-aktor non-pemerintah. (Chigas, 2003)

Bentuk diplomasi informal tersebut dapat mencakup banyak tujuan, seperti dapat membantu memberikan kesempatan kepada kelompok akar rumput dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam agenda diplomasi. Hal tersebut dapat mendukung proses perdamaian, mempertahankan hubungan komunikasi, dan dapat digunakan sebagai forum untuk membahas masalah kebijakan yang sulit untuk dibahas pada level negara. Walaupun dalam proses diplomasi yang terjadi pejabat pemerintah tidak berpartisipasi, fungsi dari kelompok para ahli dimaksimalkan dalam berbagi pemahaman terutama pandangan independen dan pribadi mereka.

Dalam kebanyakan kasus, para peserta yang terlibat mengetahui posisi pemerintah masing-masing, tetapi tidak selalu diharapkan untuk mengambil atau mempertahankan posisi kebijakan tersebut dalam dialog. Ketidakhadiran pejabat pemerintah terkadang dapat mengarah pada diskusi yang lebih terbuka, dengan kemungkinan yang lebih besar untuk menembus jalan buntu yang sulit dibandingkan jika pejabat pemerintah ikut terlibat. Lebih lanjut, diplomasi *Track II* dapat membangun saluran komunikasi sekunder yang

dapat membantu membangun kepercayaan antara kelompok peserta yang sama selama beberapa tahun. (Staats, Walsh, & Tucci, 2019)

Bentuk diplomasi non-formal ini memiliki peran yang sangat penting bagi penyelesaian konflik di masa depan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi mitra negara yang konstruktif dalam penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara. Alasan lain yang menjadikan bentuk diplomasi ini menjadi sangat penting yaitu semakin berkembangnya teknologi informasi. Pemerintah di suatu negara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber informasi terkait suatu isu yang terjadi pada negara tersebut. NGO sebagai salah satu aktor non-formal memiliki kekuatan besar berupa jejaring *networking* atau bahkan aktor-aktor individu yang memiliki pengaruh besar pada isu tersebut. Tidak menutup kemungkinan pula, sebuah perusahaan multinasional dapat menjadi salah satu sumber informasi alternatif yang terpercaya.

Salah satu contoh penyelesaian isu kemanusiaan melalui jalur diplomasi ini yaitu pada kasus perlindungan TKI di Malaysia. Amalia Sustikarini dalam tulisannya "*Dual-Track Diplomacy Governemnt-NGO: Solusi Alternatif dalam Masalah Perlindungan TKI di Malaysia*" memperlihatkan kemampuan yang dimiliki oleh NGO dalam menangani kasus tersebut. Pada kasus tersebut jelas terlihat peran penting antara NGO Indonesia dan NGO Malaysia untuk menyelesaikan isu tenaga kerja migran. Manfaat dari kekuatan jejaring yang dimiliki NGO yaitu pada pertukaran informasi terkait situasi tenaga kerja migran dalam segala aspek. Proses pertukaran informasi tersebut

terjadi pada pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan dan diikuti oleh beberapa NGO yang memiliki kepedulian dan perhatian pada isu yang sama.

Agenda utama yang dibahas pada pertemuan tersebut yaitu metode-metode atau langkah yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan perbaikan nasib tenaga kerja migran, khususnya dalam hal perlindungan. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan untuk dibawa kepada pemerintah negara bersangkutan, ataupun kepada organisasi internasional terkait. Peran NGO dalam kasus humanitarian seperti yang terjadi pada TKI di Malaysia tidak hanya sebatas memperjuangkan kebebasan mereka, tetapi juga berperan dalam melindungi, meng-advokasi, hingga memberdayakan para tenaga kerja selama proses hukum berlangsung (Sustikarini, 2004). Berangkat dari kasus tersebut, dapat terlihat bahwa *Track II Diplomacy* dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian suatu isu yang terjadi antara dua negara atau bahkan lebih. Selain itu, bentuk diplomasi ini juga tidak hanya sebatas dapat digunakan pada penyelesaian isu *high politics* tetapi juga *low politics*, seperti isu kemanusiaan.

Dari definisi-definisi dan penjelasan yang penulis telah jabarkan terkait *Track II Diplomacy*, di atas, penulis secara spesifik akan menggunakan konsep *Track II Diplomacy* yang diangkat oleh Freeman & Marks dalam tulisan mereka. Konsep tersebut nantinya akan penulis gunakan dalam membantu menganalisis isu penelitian yang diangkat agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

2.3 Konsep Penanganan Bencana Alam

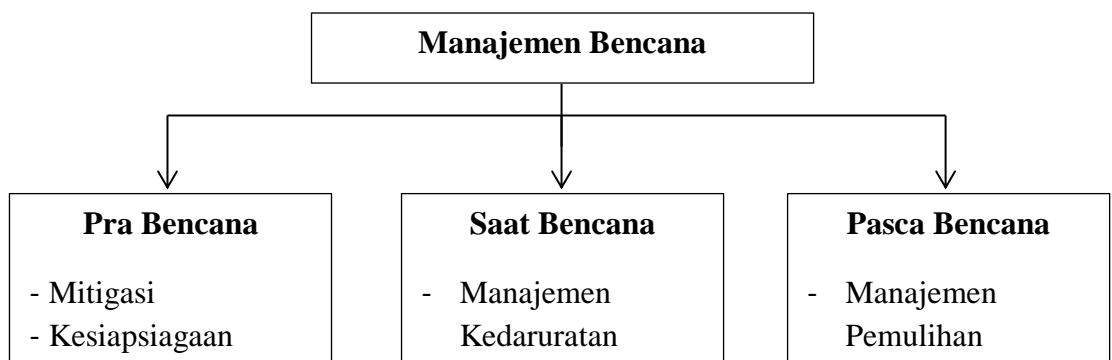
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR), Indonesia disebut sebagai negara yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia. Salah satu penyebabnya yaitu karena letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia. Data yang dikeluarkan oleh UN-ISDR tersebut dihitung berdasarkan jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi. Risiko ini tercatat paling tinggi saat bencana seperti tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi terjadi. Data dari BNPB juga menunjukkan bahwa Indonesia juga menduduki peringkat ketiga untuk ancaman gempa serta enam untuk banjir. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tsunami memiliki risiko bahaya yang paling mengkhawatirkan yaitu dengan risiko jumlah korban jiwa mencapai 5,4 juta. Salah satu upaya atau tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan bersiasat memperkecil dampak yang ditimbulkan saat bencana terjadi. (BBC News, 2011)

Pasca bencana tsunami yang terjadi di Banda Aceh pada tahun 2004, tercatat terjadi kerusakan katastropik dan mengingatkan pemerintah serta semua pihak bahwa diperlukan adanya tindakan prabencana untuk mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang akan datang. Menyikapi hal tersebut, pemerintah membuat peraturan yang dituang ke dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana yang ditujukan untuk tingkat nasional maupun daerah dan memuat tahapan prabencana, tahap tanggap darurat, dan fase pascabencana untuk mempertimbangkan semua

tahapan penanggulangan bencana secara eksplisit. Untuk memaksimalkan efektivitas dalam penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan tujuan untuk merencanakan, memahami, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan, sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah, terintegrasi dan terkoordinasi. (BNPB, 2009)

Penanganan bencana dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan sebagai upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Serangkaian tindakan ini merupakan sebuah proses yang dinamis, yang dikembangkan berdasarkan fungsi dari manajemen klasik yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Dalam proses ini juga tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga berbagai aktor lain, seperti organisasi yang harus saling bekerjasama satu sama lain. (Arsyad, 2017)

Bagan 1. Manajemen Bencana



Manajemen bencana terdiri atas tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra-bencana, tahapan ini dilakukan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.
2. Tahap tanggap darurat, tahap ini diterapkan dan dilakukan pada saat terjadi bencana.
3. Tahap pasca bencana, tahap ini diterakan setelah terjadi bencana.

Pelaksanaan tiga tahapan di atas, diikuti dengan tiga manajemen, yaitu :

1. Manajemen Risiko Bencana

Poin ini menekankan pada faktor-faktor yang bertujuan untuk mengurangi resiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Pencegahan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi, merupakan tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Kesiapsiagaan, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui berbagai tahap yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini juga termasuk dalam manajemen darurat. Pada fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana ada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

2. Manajemen Kedaruratan

Poin ini menekankan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Manajemen Pemulihan

Poin ini menekankan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana serta terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dan meliputi tahapan berikut:

- a. Rehabilitasi; yaitu tindakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

- b. Rekonstruksi; yaitu upaya pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Penerapan manajemen bencana didasarkan pada Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007.

Berikut prinsip-prinsip tersebut:

1. Cepat dan akurat; arti dan prinsip ini adalah penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prioritas; artinya bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Koordinasi; artinya penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
4. Keterpaduan; artinya tindakan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

5. Berdaya guna; artinya bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, diperlukan tindakan yang tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
6. Berhasil guna; artinya bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
7. Transparansi; artinya bahwa tindakan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Akuntabilitasi; artinya bahwa tindakan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
9. Kemitraan
10. Pemberdayaan
11. Nondiskriminasi; artinya bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
12. Nonproletisi; artinya bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Selain berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di atas, tindakan penanganan bencana juga didasarkan pada prinsip penanganan bencana internasional. Berikut prinsip-prinsip penanganan bencana internasional: (Sphere, 2021)

1. Piagam Kemanusiaan

Piagam kemanusiaan Sphere, secara ringkas berisi tentang:

- a. Komitmen lembaga-lembaga terhadap pemenuhan standar minimum dalam melakukan respon bencana.
- b. Berisi persyaratan paling mendasar bagi kelangsungan hidup dan martabat orang yang terkena dampak bencana.
- c. Memastikan akuntabilitas upaya-upaya kemanusiaan.

Piagam kemanusiaan tersebut juga disusun berdasarkan 3 prinsip, yaitu:

- a. Hak untuk kehidupan yang bermartabat.
- b. Hak untuk perlindungan dan keselamatan.
- c. Hak untuk menerima bantuan kemanusiaan.

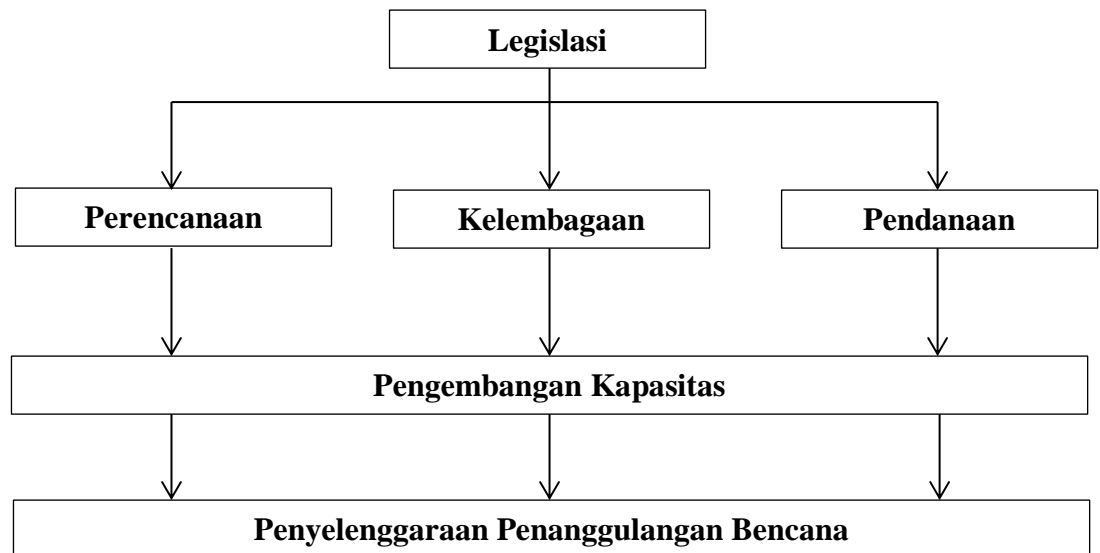
2. Prinsip Perlindungan

Tindakan atau aksi kemanusiaan yang dilakukan terdiri atas dua pilar utama, yaitu perlindungan dan bantuan. Prinsip perlindungan dalam Sphere yaitu setiap orang yang mendapat ancaman atau bahaya dalam suatu bencana atau konflik harus mendapatkan perlindungan. Prinsip ini digunakan sebagai acuan bagi lembaga kemanusiaan dalam penyelenggaraan perlindungan untuk aksi kemanusiaan. Berikut empat prinsip perlindungan dasar untuk aksi kemanusiaan dalam Sphere:

- a. Menghindari terjadinya bantuan kemanusiaan yang semakin menyengsarakan orang terkena dampak bencana.

- b. Memastikan setiap orang memiliki akses terhadap bantuan kemanusiaan yang proporsional sesuai kebutuhan mereka tanpa diskriminasi.
- c. Melindungi orang yang terkena dampak bencana dari kekerasan secara fisik dan mental akibat adanya tindak kekerasan dan pemaksaan.
- d. Mendampingi orang yang terkena dampak bencana untuk menyuarkan hak-hak mereka dan memberikan akses penyembuhan atau rehabilitasi akibat dari suatu tindak kekerasan.

Bagan 2. Sistem Penanggulangan Bencana



Terdapat enam poin utama dalam sistem penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada **Bagan 2** di atas. Berikut penjelasannya: (BNPB, 2021)

1. Legislasi
 - a. Bersifat nasional yang berdasarkan pada UU No.24 Tahun 2007, tiga Peraturan Pemerintah: PP 21/2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana; PP 22/2008 tentang pendanaan dan

pengelolaan bantuan bencana; PP 23/2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana. Perpres No.8 Tahun 2008 tentang BNPB, peraturan menteri terkait penanggulangan bencana, peraturan Kepala BNPB.

b. Bersifat daerah yang berdasarkan pada perda, pergub, perbup, dan perwali yang biasanya mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pembentukan BPBD.

2. Kelembagaan

Kelembagaan penanggulangan bencana dapat dibagi 2: formal dan non formal. Untuk formal: di pusat ada BNPB, di provinsi ada BPBD provinsi dan di kabupaten/kota ada BPBD kabupaten/kota. Dengan melihat umur UU No.24 Tahun 2007 baru jalan 5 tahun, capaian kelembagaan per 1 Agustus 2011 untuk sudah terbentuk 34 BPBD Provinsi dan 506 BPBD kabupaten/kota.

3. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana, yang kemudian didiskripsikan menjadi rencana aksi.

b. Perencanaan untuk satu jenis bencana, yaitu :

- Rencana mitigasi
- Rencana kontijensi

- Rencana operasi
- Rencana pemulihan

4. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Pendanaan dari pemerintah, dibedakan menjadi 4 berdasarkan peruntukannya: 1) kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA, termasuk Dana Alokasi Khusus, 2) kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi, 3) untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan Dana Siap Pakai, yang penggunaannya dengan kemudahan akses, 4) kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantua Sosial Berpola Hibab.
- b. Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

5. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila setiap sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelombagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat,

masyarakat terlatih, relawan, dsb. Dan sumber daya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, transportasi, obat-obatan dsb.

- b. IPTEK, a) bagaimana penguasaan iptek di daerah, misalkan sudah menggunakan komputer atau masih pakai kalkulator dan mesin ketik untuk olah data, fax, email, b) sudahkah menggunakan penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempa bumi, sistem peringatan dini, c) berapa banyak aparat BPBD/stakeholder lain yang sudah menguasai penanggulangan bencana lewat jalur perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peningkatan kapasitas daerah yang terjadi diharap dapat terjadi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lebih baik. Penyelenggaraan bencana tersebut sesuai dengan UU No.24 Tahun 2007 dan PP 21/2008.

Konsep penanganan bencana yang telah penulis paparkan di atas akan penulis gunakan dalam membantu menjawab rumusan masalah yang ada. Terutama terkait bagaimana penanganan bencana alam yang dilakukan oleh ActionAid dan Yayasan Sikola Mombine.